HUKUM

MERESPONS JEBOLNYA BENDUNG SRANDAKAN

Ketua KPP: Jangan Kambinghitamkan Penambang Rakyat

BANTUL (KR)- Penambang pasir di Sungai Progo yang tergabung dalam wadah Kelompok Penambang Pasir (KPP) tengah dilanda ketidakpastian dengan situasi sekarang ini. Khususnya terkait regulasi perizinan tambang pasir khususnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Sungai Progo. Salah satunya, proses pelayanan izin IPR dengan regulasinya berubah-ubah.

Ketua KPP, Yuninto, Kamis (13/3) mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah DIY agar dalam proses mengurus izin IPR dokumennya tidak seperti pengurusan WIUP. "Selain itu, dalam regulasi baru IPR, Rekomtex alat kerja pompa mechanik dihapus, ini melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan Undang-Undang di Negara Republik Indonesia yang memperbolehkan penambang Rakyat menggunakan pompa mechanik," ujarnya.

Selain itu, pembatasan luasan IPR di dalam regulasi di Yogyakarta sangat mencederai perasaan penambang rakyat di Yogyakarta. Oleh karena itu,

KR-Istimewa

Yunianto

KPP berharap beberapa hal kepada pemerintah DIY yakni, Pemerintan DIY harus membina penambang rakyat dengan jalan mempermudah perizinan IPR. Menurut Yunianto, Pemerintah DIY harus menyadari dengan mempermudah izin IPR berarti secara tidak langsung memperkuat ekonomi kerakyatan masyarakat di sepanjang kali Progo.

"Pemerintah DIY harus objektif dalam memandang kasus jebolnya DAM Srandakan. Saya mohon dibentuk Tim Independen untuk meneliti konstruksi DAM tersebut apakah besi dan jenis matrial yang lain sudah sesuai dengan spek. Jangan hanya mengkambinghitamkan penambang rakyat," tegas Yunianto.

Dengan kondisi seperti itu, akhirnya KPP bakal menggulirkan program, di antaranya, meneruskan dan mendorong anggota KPP untuk pengurusan izin IPR di Sungai Progo, mendorong/mendesak Legislatif dan Birokrasi di Yogyakarta agar memberi pelayanan izin mudah, cepat, dan memberikan alat kerja sesuai Undang-Undang di Indonesia.

"Tidak hanya itu, KPP akan membentuk Satgas dengan merekrut anggota untuk menjaga lokasi di dekat instalasi vital seperti jembatan dan bendungan untuk tidak di tambang oleh siapapun. Ini adalah bentuk komitmen KPP dalam menjaga infrastruktur vital milik negara.

Yang terakhir KPP tetap mempunyai semboyan bekerja sekaligus menjaga lingkungan sepanjang kali Progo. Kepada Bapak/ibu di Birokrasi, Legislatif maupun aparat penegak hukum tolong lihat dan perhatikan kami penambang rakyat di kali Progo sebagai rakyat yang harus diberi kesempatan berusaha dan berkontribusi untuk negara ini," ujar Yunianto **(Roy)-f**

Bantul Sasaran Pemasaran MinyaKita yang Isinya Tak Penuh

BANTUL (KR)- Wakil Bupati Bantul, H Aris Suharyanta SIP MM, bersama rombongan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul dan DIY melakukan pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan bahan pokok di wilayahnya Bantul menjelang Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

Salah satunya yang dikunjungi pasar tradisional Imogiri, Kamis (13/3). "Sejumlah pedagang pasar mulai dari daging sapi, daging ayam, minyak goreng, cabai, bawang merah dan beras, serta sayuran rata rata harga masih normal. Stok saat ini masih aman," kata Wabup Bantul usai pemantauan bahan pokok di Pasar Imogiri.

Bantul termasuk jadi sasaran pemasaran MinyaKita kemasan botol yang isinya tidak full. Mestinya 1.000 mm tetapi hanya isi 985 mm. Kurang 15 mm. "Penemuan minyak goreng isinya tidak full sudah kami laporkan ke pusat," kata Aris.

Tetapi untuk komoditas cabai seperti cabai merah harga di pasaran masih tinggi atau mahal, belum mengalami penurunan kembali sejak mengalami kenaikan harga saat memasuki Ramadan 1446 H.

"Cabai merah ini agak mahal, harganya sekitar Rp 80.000 per kilogram, dua kali lipat dari dari harga cabai yang lainnya, misalnya cabai merah besar di harga Rp 55.000 per kilogram, cabai merah keriting harganya Rp 36.600 per kilogram," katanya.

Menurut Wakil Bupati Bantul, dari hasil pantauannya rata-rata harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di

KR-Judiman

Wakil Bupati Bantul bersama rombongan memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Imogiri.

Bantul relatif stabil. Seperti yang sudah dipantau sebelumnya, yakni di Pasar Bantul, Pasar Pijenan, Pasar Niten, dan Pasar Piyungan.

Sementara sejumlah pedagang pasar memberikan keterangan, harga komoditas cabai tidak pernah stabil, sehingga ke depan harga bisa saja turun, juga bisa naik tergantung ketersediaan dan permintaan. Walaupun harga selalu tidak stabil mereka tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan stok cabe.

Dari pantauan Wakil Bupati Bantul, selain cabai, harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan di antaranya bawang merah naik dari Rp 5.100 menjadi Rp 44.000/kg dan bawang putih kating naik menjadi Rp 44.600/kg. **(Jdm)-f**

Pekerjaan Padat Karya 2025 Kualitasnya Lebih Bagus Dibanding 2024.

KR-Judiman

Jalan cor blog hasil kegiatan padat Karya di Bantul

BANTUL (KR) - Program padat karya insfrastruktur 2025 di Kabupaten Bantul, yang dikerjakan selama 21 hari secara serentak sejak 18 Februari 2025 hingga Kamis (13/3) sudah selesai.

Hasil padat karya yang dikerjakan tahun 2025, baik kualitas maupun kuantitas semua lebih bagus dibanding padat karya tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2025 ini mengalokasikan anggaran dana untuk program padat karya senilai 19,5 miliar, untuk 195 titik pekerjaan yang masing-masing titik dibatasi senilai Rp 100 juta. Dengan selesainya semua pekerjaan padat karya 2025, maka proses pencairan honor kepada pekerja segera direalisasikan, agar bisa untuk kebutuhan Lebaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Istirul Widilastuti SIP MPA , pasca Lebaran nanti akan ada program padat karya lagi yang anggarannya dari DIY. Karena itu di depan para Pengawas Lapangan (PL) Padat Karya Disnaker Bantul yang menjadi kepanjangan tangan Disnakertrans Bantul dalam pengawasan pekerjaan di lapangan, Istirul menekan, agar benar-benar mengarahkan atau mengawasi proses pengerjaan yang ditugaskan kepada dirinya."Agar kualitas pekerjaan padat karya bisa bagus sesuai spek dan sesuai arahan yang diberikan saat mulai dikerjakan," katanya.

Selama pengerjaan padat karya 2025 Kepala Disnakertrans Bantul juga aktif melakukan monitoring pekerjaan di lapangan. Hampir seluruh titik projek dikunjungi untuk melihat dari dekat bagaimana pengerjaan yang dilakukan di lapangan. Istirul mengakui ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai arahan, misalnya pekerjaan jalan cor blog yang tidak disiram air sehingga ada yang retak. Tetapi padat karya 2025 lebih bagus kualitasnya dibanding padat karya 2024. Kendala di lapangan juga tidak ditemukan.

Lebih lanjut dikatakan, kualitas pekerjaan padat karya dapat diukur dari tingkat pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan dampaknya terhadap perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, program padat karya mampu memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, juga mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar.

Untuk penyerapan tenaga kerja, program padat karya mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah . Untuk penyerapan tenaga kerja, program padat karya mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, menyerap pengangguran, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan tetap.

Sementara dampak terhadap perekonomian, program padat karya mampu membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendukung perekonomian lokal, membantu percepatan pengentasan kemiskinan, membantu pemulihan ekonomi nasional.

Program padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibanding mesin. Program ini banyak dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kementerian ketenagakerjaan. Jenis padat karya yakni pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, seperti perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan atau perbaikan jembatan.

Sedangkan manfaat padat karya, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan daya beli, memanfaatkan sumber daya alam dan memanfaatkan tenaga kerja lokal. **(Jdm)**

KR-Judiman
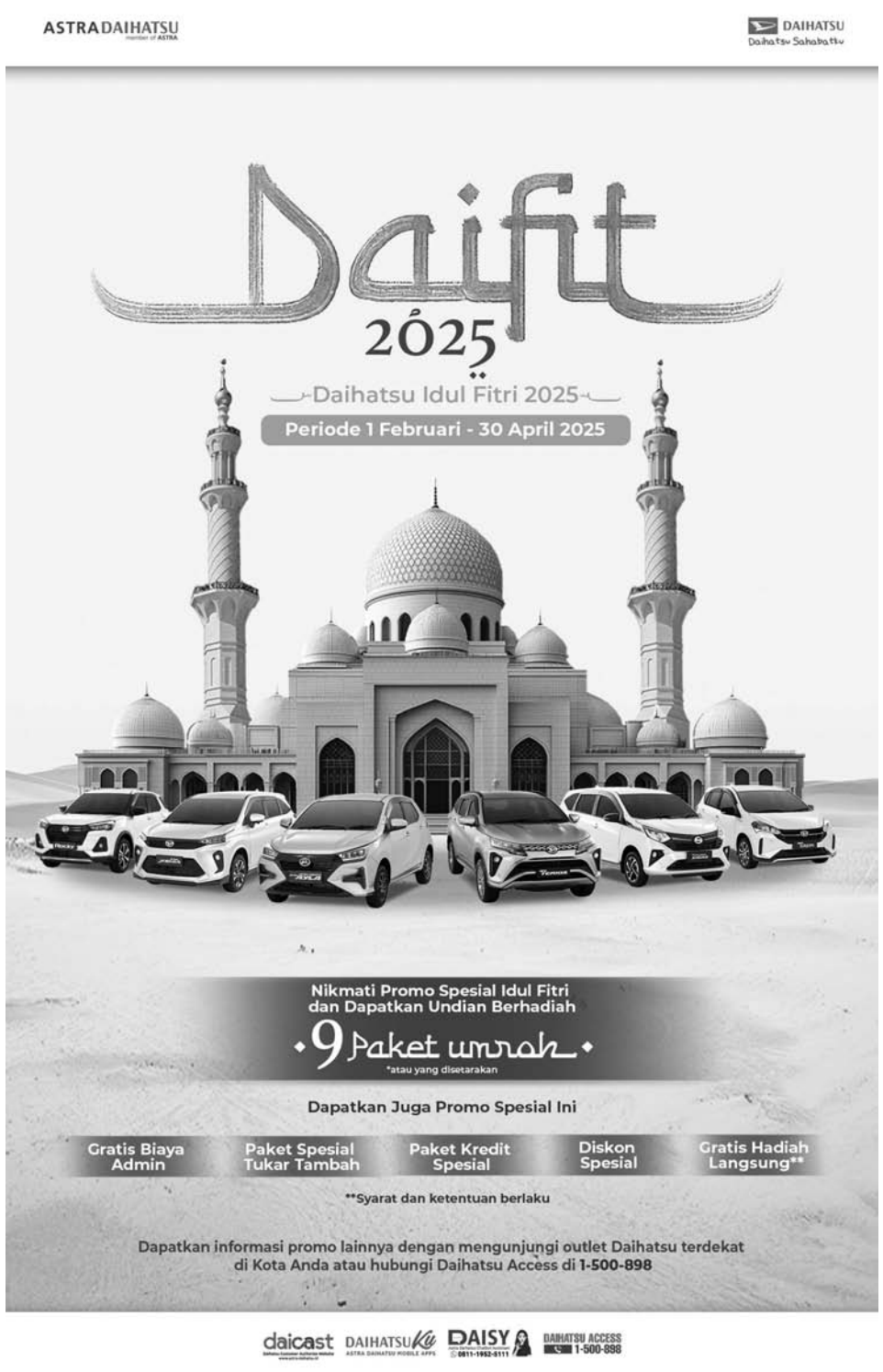
Talud hasil kerja padat karya di Bantul.